

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu dicantumkan indikator kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau dikawal didalam tiap-tiap Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD.

Indikator Kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap SKPD mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Gubernur yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada periode RPJMD (2013-2018)
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indonesia Governance Index	5,90	5,92	5,94	5,96	5,98	6,00	
2	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikai ISO	19 UPP	21 UPP	23 UPP	25 UPP	27 UPP	29 UPP	
3	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM	9 SKPD/UPT	11 SKPD/UPT	13 SKPD/UPT	15 SKPD/UPT	17 SKPD/UPT	19 SKPD/UPT	SKPD/UPT
4	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

2

RENSTRA Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

2

	WTP							
6	Jumlah Peraturan Peraturan perundangan Daerah yang disusun	17 Perda	18 Perda	20 Perda	22 Perda	24 Perda	26 Perda	2
7	Implementasi Aksi PPK	Prov., Kab. Pema lang, Kot. Semarang	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov & 35 k/k	Prov
8	Persentase Angka Kemiskinan	14,44	11,58 - 11,37	9,05 - 8,75	8,60 - 8,35	8,25 - 8,00	7,80 - 7,60	7,8